Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju

Pergeseran struktural perekonomian global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia, memberikan tantangan pada perekonomian domestik 2019. Pertumbuhan ekonomi 2019 tidak sekuat pertumbuhan tahun sebelumnya, meskipun tetap berdaya tahan ditopang permintaan domestik yang baik dan stabilitas yang terjaga. Perkembangan ini merupakan buah dari sinergi kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait yang makin kuat. Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diprakirakan terus membaik, kendati prospek pertumbuhan ekonomi 2020 dapat tertahan dipengaruhi dampak meluasnya COVID-19. Prospek jangka menengah yang kuat perlu terus didukung oleh sinergi semua pihak sehingga dapat mempercepat transformasi ekonomi dan menumbuh-kembangkan inovasi, termasuk inovasi digital, sebagai prakondisi untuk menuju Indonesia maju.

TINJAUAN UMUM

Dinamika perekonomian 2019 mengangkat tiga elemen strategis untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi yakni Sinergi, Transformasi, dan Inovasi. Elemen sinergi mengemuka setelah melihat peran kuat sinergi antar pemangku kebijakan dalam merespons berbagai tantangan dari global yang berdampak kurang menguntungkan kepada perekonomian Indonesia. Sinergi yang makin kuat dapat membawa perekonomian Indonesia 2019 tetap berdaya tahan, ditopang oleh stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tetap baik, meskipun melambat dibandingkan dengan kondisi 2018. Elemen sinergi kebijakan juga menjadi penting karena mendukung percepatan transformasi ekonomi Indonesia dengan struktur dan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk untuk terus menumbuh-kembangkan inovasi, termasuk inovasi ekonomi-keuangan digital, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Ketiga elemen strategis tersebut menjadi penting guna merespons pergeseran struktural di perekonomian global yang terus menguat. Pergeseran dimulai dengan meluasnya kebijakan di banyak negara yang menjadi lebih berorientasi domestik (*inward looking orientation*), termasuk tentang hubungan perdagangan antarnegara. Pergeseran kedua berkaitan dengan volatilitas arus modal dunia yang meningkat dan memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Integrasi pasar keuangan dunia yang makin kuat turut mendorong kondisi ini. Dua pergeseran selanjutnya berhubungan dengan perkembangan digitalisasi ekonomi-keuangan yang pesat dan akhirnya mengubah perilaku agen ekonomi sebagai respons atas perkembangan digitalisasi tersebut. Pergeseran ini kemudian menimbulkan kompleksitas pengelolaan makroekonomi karena berdampak pada berubahnya efektivitas kebijakan. Akibatnya, strategi yang ditempuh tidak hanya dapat bertumpu pada satu kebijakan dan satu instrumen, namun perlu didukung kebijakan lain sehingga menjadi satu kebijakan yang terintegrasi.

Pergeseran dalam perekonomian global, terutama perilaku *inward looking* dan volatilitas pasar keuangan yang meningkat, berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia 2019. Pertumbuhan ekonomi global 2019 melambat menjadi 2,9% serta diikuti oleh penurunan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Kondisi ini mendorong ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi sampai triwulan III-2019 dan mengakibatkan berkurangnya aliran modal global ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian pasar keuangan global mulai berkurang pada triwulan akhir 2019, pasca ditempuhnya banyak kebijakan stimulus fiskal dan moneter di berbagai negara guna memitigasi risiko perlambatan ekonomi. Respons tersebut termasuk langkah the Fed yang mulai menurunkan suku bunga kebijakan, *Fed Funds Rate*, pada akhir Juni 2019. Selain kebijakan siklikal, kebijakan struktural juga ditempuh di banyak negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, meskipun kecepatannya belum sesuai harapan akibat siklus ekonomi dunia yang belum kuat.

Perekonomian Indonesia Berdaya Tahan

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat berdampak pada turunnya kinerja ekspor Indonesia 2019 (Diagram 1). Ekspor 2019 terkontraksi 0,87%, berbalik arah dari kinerja 2018 yang tumbuh 6,55%. Penurunan ekspor tercatat cukup dalam pada semester I 2019, sebelum sedikit berkurang pada semester II 2019 ditopang oleh peningkatan permintaan beberapa produk ekspor, seperti *crude palm oil* (CPO) dan batu bara. Perbaikan ekspor di beberapa komoditas merupakan dampak diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta beberapa kebijakan domestik. Diversifikasi produk ekspor didukung daya saing yang membaik sehingga menopang kinerja positif beberapa produk ekspor seperti produk besi baja, otomotif, *pulp* dan *waste paper*, emas, dan serat tekstil. Tujuan ekspor juga meluas seperti ke pasar ASEAN dan Arab Saudi, khususnya untuk produk besi baja. Sementara itu, beberapa kebijakan domestik memengaruhi perbaikan kinerja ekspor komoditas nikel dan tembaga.

Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik yakni 5,02%. Konsumsi swasta sedikit meningkat didukung oleh daya beli yang terpelihara sejalan dengan pendapatan yang terjaga dan inflasi yang rendah, serta keyakinan konsumen yang baik. Konsumsi swasta juga didukung oleh dampak penyelenggaraan Pemilu 2019 sehingga meningkatkan pertumbuhan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kinerja investasi tetap baik, terutama didukung investasi bangunan yang tetap tinggi didorong oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta kinerja konstruksi

> "Di tengah kinerja sektor eksternal yang kurang menguntungkan, permintaan domestik tetap kuat sehingga menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap baik "

swasta yang meningkat. Sementara itu, investasi nonbangunan menurun dipengaruhi kontraksi ekspor dan permintaan domestik yang tidak sekuat tahun sebelumnya. Daya tahan perekonomian yang tetap baik juga dipengaruhi proses penyesuaian ekonomi domestik terhadap gejolak eksternal sehingga mendorong penurunan impor. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga pada 2019 berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, tercermin pada menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Daya tahan pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap baik ditopang respons banyak daerah yang mengoptimalkan perdagangan antardaerah serta meningkatkan nilai tambah produk. Kondisi ini tergambar pada perdagangan antardaerah yang meningkat seperti pada produk minyak sawit terkait implementasi program B20 yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) yang meningkat juga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan ditopang oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batu bara ke Tiongkok. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat terutama dipengaruhi ekspor yang menurun serta kendala produksi tembaga di Sulampua.

Perekonomian domestik yang tetap berdaya tahan mendorong kenaikan aliran masuk modal asing, menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), dan memperkuat nilai tukar Rupiah. NPI 2019 tercatat surplus 4,68 miliar dolar AS, berbalik arah dari kondisi 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar dolar AS. Surplus NPI 2019 didukung oleh kenaikan surplus Transaksi Modal dan Finansial (TMF) sejalan terjaganya optimisme investor terhadap prospek perekonomian domestik dan tingginya daya tarik pasar keuangan domestik, serta menurunnya ketidakpastian pasar keuangan dunia pada triwulan IV-2019. Defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi 2,72% dari PDB juga mendukung surplus NPI 2019. Cadangan devisa juga meningkat menjadi 129,18 miliar dolar AS atau setara dengan pembayaran 7,33 bulan impor dan ULN pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Kinerja sektor eksternal yang positif kemudian berkontribusi pada apresiasi nilai tukar Rupiah, yang secara rerata menguat 0,76% dan secara *point-to-point* (ptp) menguat 3,58% sehingga ditutup di level Rp13.883 per dolar AS pada akhir 2019. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung struktur pasar valas yang makin dalam dan efisien, termasuk pasar *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) yang terus meningkat.

Inflasi juga tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas makroekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 tercatat 2,72%, menurun dibandingkan dengan capaian 2018 yang mencapai 3,13%. Perkembangan ini membawa inflasi IHK kembali berada dalam kisaran sasaran 3,5±1%, melanjutkan pencapaian 4 tahun terakhir yang juga konsisten berada dalam kisaran sasarannya. Inflasi 2019 yang rendah dipengaruhi faktor siklikal permintaan domestik yang terjaga dan nilai tukar yang terapresiasi, serta inflasi kelompok *Administered Prices* yang rendah. Selain itu, inflasi yang tetap rendah juga dipengaruhi oleh perbaikan struktural seperti peran ekspektasi inflasi dalam pembentukan inflasi yang makin besar dan terjangkar, dampak nilai tukar ke inflasi yang menurun, serta dampak positif sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan.

Stabilitas sistem keuangan juga tetap terkendali, didukung transmisi kebijakan moneter yang baik. Pada 2019, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) berada dalam zona normal didukung oleh kinerja institusi keuangan dan pasar keuangan yang baik. Hal ini tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) yang terjaga, risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loans*) yang aman, dan rasio alat likuid bank terhadap dana pihak

Diagram 1. Perekonomian Global dan Dinamika Perekonomian Domestik

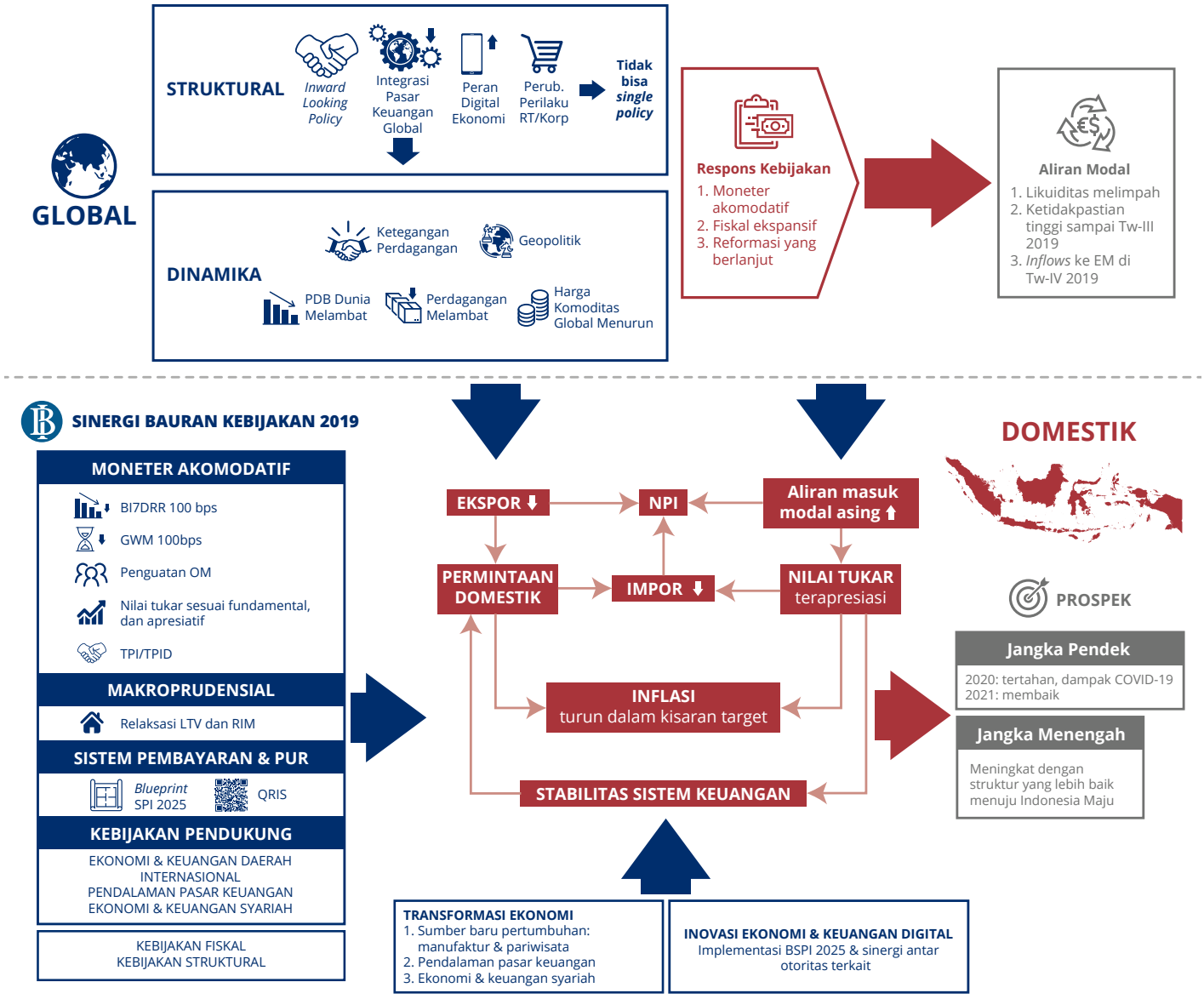

ketiga (AL/DPK) yang tinggi. Transmisi pelongaran kebijakan moneter yang tetap berjalan baik juga mendukung perkembangan ini. Likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap memadai sehingga mendukung cukup baiknya transmisi suku bunga di pasar uang. Transmisi kepada suku bunga perbankan juga berlanjut, meskipun belum optimal.

Di tengah stabilitas sistem keuangan yang terjaga, fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Pertumbuhan kredit perbankan 2019 tercatat sebesar 6,08%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 11,75%. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit yang lambat dipengaruhi perilaku korporasi yang menahan permohonan kredit sejalan dengan kinerja ekspor dan kegiatan investasi nonbangunan yang menurun. Sementara dari sisi penawaran, perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit mempertimbangkan perkembangan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi kinerja korporasi domestik. Pertumbuhan kredit yang rendah berpengaruh pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) yang belum meningkat kuat. Pertumbuhan M2 tercatat 6,5% pada 2019, hanya sedikit naik dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 6,3%.

Sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang terkendali, kelancaran sistem pembayaran

> "Perekonomian Indonesia yang berdaya tahan merupakan buah dari sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait."

tetap terjaga baik. Pertumbuhan uang tunai tetap positif di tengah pesatnya inovasi dan pertumbuhan instrumen nontunai. Sementara itu, transaksi pembayaran nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Desember 2019 tumbuh 2,45% (yoy), didominasi oleh instrumen kartu ATM/Debit dengan pangsa 92,92%. Transaksi UE juga meningkat signifikan mencapai 188,31% (yoy), yang mengindikasikan terus menguatnya preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital dalam bertransaksi.

Sinergi Kebijakan Mendukung Daya Tahan Ekonomi

Perekonomian Indonesia yang berdaya tahan di tengah ekonomi global yang menurun merupakan buah dari sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait. Respons kebijakan diarahkan untuk mendorong perekonomian agar dapat kembali meningkat menuju kondisi lintasan optimumnya. Dinamika ekonomi 2019 menunjukkan, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit Indonesia terindikasi perlu terus didorong menuju kapasitas optimumnya. Dorongan tidak hanya untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk memperpendek siklus perlambatan pertumbuhan sehingga dapat segera kembali menuju level optimum. Respons kebijakan ini memungkinkan untuk ditempuh mengingat saat bersamaan stabilitas perekonomian tetap terjaga sehingga memberi ruang bagi kebijakan yang akomodatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan dampak yang mengganggu stabilitas.

Dalam implementasinya, sinergi kebijakan ditujukan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat struktur perekonomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah pada 2019 meningkatkan stimulus kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan fiskal diimplementasikan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap mendukung penguatan iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan (*creative financing*). Ketiga strategi mendukung tetap terjaganya prospek kesinambungan fiskal dengan realisasi defisit APBN 2019 terkendali di bawah 3% yakni 2,2% dari PDB. Perkembangan ini secara keseluruhan membuat utang pemerintah pada 2019 tetap sehat yakni 30,2% dari PDB.

Kebijakan struktural juga ditempuh sebagai bagian dari sinergi kebijakan guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi sangat strategis bagi pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju sebagai target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengingat menjadi tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025. Dalam kaitan ini, Pemerintah menetapkan 5 strategi utama untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kelima strategi tersebut meliputi pembangunan SDM melalui peningkatan kompetensi keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur untuk menopang konektivitas industri dan pariwisata, penyederhanaan regulasi melalui *omnibus law* yang difokuskan pada penerbitan undang-undang (UU) Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, penyederhanaan birokrasi, dan kebijakan untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi. Transformasi ekonomi didukung oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas terkait yang secara konsisten melanjutkan reformasi struktural.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif agar dapat optimal menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan ditempuh setelah mengkaji kondisi stabilitas perekonomian yang tetap terjaga di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang berada di bawah lintasan optimumnya. Kondisi ini memberikan ruang pelonggaran bagi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan gangguan bagi stabilitas perekonomian. Bank Indonesia meyakini bauran kebijakan yang ditempuh, dari kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, hingga kebijakan pendukung lain, memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perkembangannya, pilihan instrumen dan *timing* implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi pada paruh pertama 2019, menjadi pertimbangan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR). Di tengah kondisi global yang tidak menguntungkan ini, Bank Indonesia secara konsisten fokus kepada upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan agar stabilitas sistem keuangan terkendali. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat strategi operasi moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Respons kebijakan terlihat makin menjaga stabilitas perekonomian sehingga memberikan ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, mempertimbangkan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi sampai Juni 2019 tersebut, Bank Indonesia memilih untuk melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah pada Juni 2019. Ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan BI7DRR baru diambil Bank Indonesia pada paruh kedua 2019 setelah ketidakpastian pasar keuangan global mereda pasca penurunan FFR pada Juli 2019. Selanjutnya, bauran kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif juga ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lainnya.

Secara lebih terperinci, kebijakan moneter yang akomodatif dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan GWM Rupiah dan suku bunga kebijakan. Bank Indonesia baru mengambil langkah pelonggaran kebijakan moneter pada Juni 2019

> "Kebijakan moneter akomodatif dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan suku bunga kebijakan"

setelah mempertimbangkan ruang pelonggaran kebijakan moneter yang tersedia akibat menurunnya tekanan inflasi dan nilai tukar, dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Namun, Bank Indonesia lebih memilih pelonggaran kebijakan moneter melalui instrumen kuantitas uang yakni GWM mengingat ketidakpastian global saat itu masih tinggi. Pada Juni 2019, Bank Indonesia menurunkan GWM Rupiah 50bps menjadi 6,00%, sehingga memberikan tambahan likuiditas kepada perbankan sebesar Rp25,3 triliun. Dalam perkembangan berikutnya di paruh kedua 2019, Bank Indonesia mulai memanfaatkan ruang pelonggaran melalui penurunan BI7DRR pasca meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada Juli 2019, BI7DRR diturunkan sebesar 25bps menjadi 5,75%. Selanjutnya, seiring makin kondusifnya kondisi pasar keuangan global dan tetap menariknya daya saing aset keuangan domestik serta tetap rendahnya tekanan inflasi dan terkendalinya nilai tukar, Bank Indonesia melanjutkan penurunan BI7DRR masing-masing 25bps di bulan Agustus, September, dan Oktober 2019 hingga menjadi 5,00% dan bertahan sampai Desember 2019. Terakhir, Bank Indonesia kembali menggunakan instrumen GWM Rupiah yang diturunkan 50bps pada November 2019 sehingga menjadi 5,5%, yang berlaku efektif pada 2 Januari 2020.

Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan strategi operasi moneter dan menempuh kebijakan nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Penguatan strategi operasi moneter ditujukan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan moneter. Bank Indonesia mengimplementasikan operasi moneter pada dua sisi (*two sided monetary operation*), baik dari sisi absorbsi maupun injeksi, dengan meredistribusi likuiditas. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan moneter dengan penyeragaman instrumen operasi moneter pasar terbuka melalui implementasi *reverse repo* Surat Berharga Negara (RR SBN) untuk semua tenor mulai 7 hari sampai dengan 12 bulan. Dari kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia konsisten menjaga volatilitas Rupiah agar tidak berlebihan sehingga dapat mendukung ekspektasi pelaku ekonomi dan memudahkan pengambilan keputusan pelaku ekonomi. Dalam kaitan ini Bank Indonesia menempuh kebijakan stabilisasi Rupiah melalui strategi *triple intervention,* baik di pasar *spot*, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.

Bank Indonesia juga terus menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Kebijakan diambil untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia melonggarkan pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)/RIM Syariah menjadi 84-94% dan memperluas pendanaan perbankan, termasuk pinjaman luar negeri yang pruden. Ketentuan rasio *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)* juga dilonggarkan menjadi rata-rata 5-10% untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan, termasuk yang ramah lingkungan. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga didukung oleh kebijakan pengembangan ekonomi syariah dan UMKM. Selain aspek prudensial, kebijakan mendorong intermediasi juga diimbangi dengan kebijakan menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas yang memadai. Pada 2019, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) pada level 0% dan 4%. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga juga didukung oleh sinergi kebijakan antar otoritas di sektor keuangan, seperti melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi menjadi elemen utama kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program bantuan sosial pemerintah, transaksi pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk sektor swasta, Bank Indonesia meluncurkan *Blueprint* Sistem

Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) sebagai respons kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi disrupsi digital. *Blueprint* diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Di sisi tunai, efisiensi dan jangkauan distribusi pengedaran uang terus diperluas ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tetap menjaga kualitas uang yang diedarkan.

Ekonomi Tertahan di 2020, Membaik di Jangka Menengah

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2020 tidak sekuat capaian 2019 sejalan dengan meluasnya dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ke seluruh dunia. Bank Indonesia awalnya pada akhir 2019 sempat memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 akan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang diprakirakan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi, terutama investasi nonbangunan. Namun, pasca merebaknya COVID-19 di Tiongkok, pada Februari 2020, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 5,0-5,5% untuk tahun 2020. Prospek ini dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung penurunan ekonomi Tiongkok. Peran ekonomi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia yang tidak kecil, khususnya melalui jalur pariwisata, ekspor, dan investasi, memengaruhi prakiraan ini.

Pada Maret 2020, Bank Indonesia memprakirakan COVID-19 yang terus meluas ke banyak negara, makin menekan prospek perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan menjadi lebih rendah dipengaruhi oleh penurunan sisi permintaan dan penawaran, termasuk pengaruh disrupsi sisi produksi dan menurunnya keyakinan. Hal ini karena mobilitas pelaku ekonomi yang terhambat sejalan dengan upaya penanganan penyebaran COVID-19 di banyak negara, termasuk di Indonesia, akan menurunkan kinerja perekonomian dari sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan kemudian merambat sektor lainnya. Kondisi ini akan menurunkan kinerja ekspor barang dan jasa, serta mendorong konsumsi swasta dan investasi menjadi lebih rendah. Ketidakpastian pasar keuangan juga meninggi dipicu prospek perekonomian global yang menurun dan memengaruhi penanaman modal, termasuk aliran modal jangka pendek, ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini akhirnya memberikan tekanan kepada mata uang dunia, termasuk Rupiah. Dengan perkembangan sampai Maret 2020, Bank Indonesia merevisi kembali prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi 4,2-4,6%.

Di tengah prospek penurunan pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Prospek NPI 2020 diprakirakan tetap aman ditopang oleh penurunan defisit transaksi berjalan, yang diprakirakan berada pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB tahun 2020. Inflasi 2020 diprakirakan terkendali dalam sasaran 3,0±1% ditopang oleh inflasi inti yang terjaga dipengaruhi terjangkarnya ekspektasi inflasi dan belum kuatnya permintaan yang akan menciptakan stabilnya inflasi inti. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan diprakirakan tetap kuat, meskipun intermediasi perbankan kembali menghadapi tantangan akibat penurunan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan kredit dalam kisaran 6,0-8,0% pada 2020, dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan diprakirakan mencapai 6,0-8,0%.

Prospek perekonomian global dan domestik pada 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Risiko berlanjutnya penyebaran COVID-19 dalam jangka waktu lebih lama dan wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dan volume perdagangan dunia makin melambat. Hal tersebut dapat kembali menimbulkan koreksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini karena semakin terhubungnya jalur perdagangan dan sistem keuangan antarnegara saat ini, membuat dampak penurunan pertumbuhan global dapat makin cepat tertransmisikan ke negara-negara lainnya.

Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Indonesia baru kembali membaik pada 2021. Prakiraan ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021 yang kembali meningkat seiring

> "Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diprakirakan terus menguat sejalan dengan perbaikan perekonomian global dan peningkatan produktivitas"

dengan pemulihan ekonomi global pasca berakhirnya tekanan COVID-19. Prospek perbaikan ekonomi dunia pasca berakhirnya COVID-19 mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%. Stabilitas ekonomi juga terjaga sehingga inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%. Prospek ini dipengaruhi oleh terjangkarnya ekspektasi inflasi, terkelolanya permintaan, dan membaiknya kondisi eksternal sehingga inflasi inti diprakirakan tetap terkendali. Prospek inflasi *volatile food* tetap terkendali didukung prospek inflasi pangan di sebagian besar wilayah yang diprakirakan tetap terjaga. Prospek ini ditopang oleh penguatan kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang turut mendukung pencapaian sasaran inflasi secara nasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diprakirakan terus menguat sejalan dengan perbaikan perekonomian global dan peningkatan produktivitas. Pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor eksternal. Selain itu, produktivitas Indonesia juga diprakirakan meningkat sejalan dengan dampak positif reformasi struktural yang telah ditempuh dan pemanfaatan bonus demografi. Bank Indonesia memparkirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,5-6,1% dengan inflasi yang terjaga di kisaran sasarannya serta defisit transaksi berjalan yang berada pada kisaran 2,2-2,7% dari PDB hingga 2024. NPI dalam jangka menengah tetap baik, didukung oleh terjaganya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya aliran modal asing. Inflasi dalam jangka menengah yang terkendali dalam lintasan menurun dipengaruhi dengan produktivitas dan kapasitas perekonomian yang terus meningkat. Prakiraan inflasi yang terkendali juga disertai disparitas inflasi antarwilayah dan antarwaktu yang mengecil. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diprakirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Kunci Penguatan Prospek: Transformasi Ekonomi dan Inovasi Digital

Bank Indonesia meyakini bahwa prospek perekonomian Indonesia jangka menengah-panjang yang baik dapat dicapai dengan dukungan percepatan proses transformasi ekonomi. Hal ini penting karena transformasi ekonomi menjadi prakondisi untuk membawa Indonesia berada dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2045. Transformasi ekonomi antara lain meliputi penguatan peran sektor-sektor prioritas yang dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian. Sektor prioritas meliputi sektor yang tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan eksternal melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa. Sejalan dengan ini, transformasi ekonomi juga berkaitan penguatan sektor produksi melalui peningkatan investasi. Peningkatan nilai tambah perekonomian juga didukung oleh pemberdayaan berbagai sumber daya domestik sebagai faktor produksi serta penguatan infrastruktur pendukung, termasuk infrastruktur di sektor keuangan.

Beberapa sektor unggulan dapat diperkuat untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat mempercepat proses transformasi ekonomi. Penguatan sektor manufaktur ditempuh melalui *two-pronged approach* yakni meningkatkan peran industri manufaktur untuk menopang kinerja ekspor dan meningkatkan nilai tambah. Penguatan peran sektor manufaktur dilakukan melalui strategi

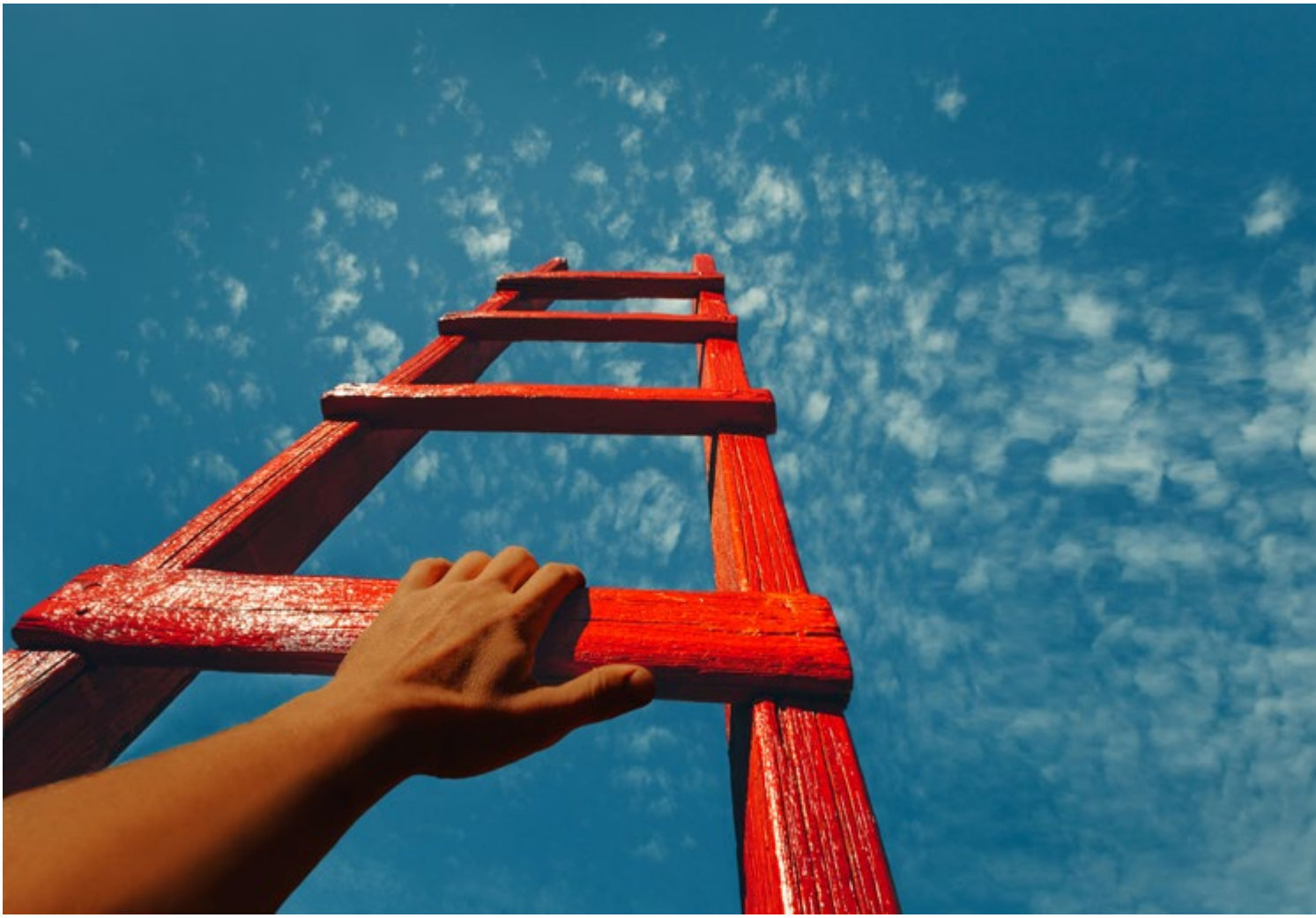

end-to-end yang bersifat menyeluruh, terintegrasi dan inklusif. Selain sektor manufaktur, transformasi ekonomi juga ditempuh melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber penghasil devisa dan pertumbuhan ekonomi baru. Dengan kondisi ini, pengembangan sektor pariwisata diharapkan akan mendukung upaya menurunkan defisit transaksi berjalan, khususnya melalui penerimaan dari wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu terus dikembangkan dengan memperkuat potensi destinasi wisata sehingga berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan peran sektor pariwisata ditempuh melalui pendekatan 3A2P (Akses, Atraksi, Amenitas, Pelaku dan Promosi) yang didukung sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

Percepatan transformasi ekonomi juga dilakukan dengan optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah serta percepatan pendalaman pasar keuangan. Pengembangan ekonomi syariah diarahkan melalui peningkatan peran industri halal dan pariwisata ramah muslim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan berprinsip syariah. Strategi ini ditempuh secara terintegrasi melalui pengembangan ekosistem *halal value chain*, didukung oleh pembiayaan syariah sekaligus peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, upaya pendalaman pasar keuangan dilakukan secara bersinergi oleh Bank Indonesia dan otoritas terkait dengan fokus pada pengembangan sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko, pengembangan infrastruktur pasar keuangan, dan pembentukan kerangka regulasi. Pendalaman pasar keuangan juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas rencana pembangunan jangka menengah.

Upaya untuk menumbuh-kembangkan inovasi, khususnya inovasi untuk memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital, juga penting untuk memperkuat prospek ekonomi

Indonesia jangka menengah panjang. Hal ini sangat strategis dilakukan karena peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan sehingga telah mendorong perubahan perilaku agen ekonomi. Perubahan pada gilirannya memerlukan respons kebijakan yang tepat dan komprehensif. Di satu sisi, inovasi teknologi digital yang pesat di industri keuangan telah mendorong efisiensi dan memunculkan sumber pertumbuhan baru. Perubahan pola konsumsi masyarakat dan hubungan industrial antarpelaku ekonomi yang makin modular menawarkan bisnis model baru yang serba cepat, mudah, dan murah. Pelaku industri baru muncul dan mendapat tempat di hati konsumen, memaksa pelaku lama untuk melakukan transformasi digital. Namun di sisi lain, risiko yang menyertainya juga harus dapat dimitigasi dengan cermat. Di sektor keuangan, risiko *shadow banking* mulai terlihat, sebagaimana halnya risiko konsentrasi penguasaan data yang mengarah pada konsentrasi usaha. Transmisi kebijakan bank sentral mulai terpengaruh bersamaan dengan kesinambungan ketahanan ekonomi karena risiko konsentrasi yang terus menguat melalui pembentukan ekosistem digital. Risiko siber dan disrupsi digital kepada pasar tenaga kerja juga harus diperhitungkan.

Bank Indonesia merumuskan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 sebagai respons kebijakan untuk mendorong upaya integrasi ekonomi keuangan digital nasional, sekaligus menjamin keberlangsungan fungsi bank sentral serta mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. BSPI 2025 berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Lima visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dirumuskan sekaligus menjadi target akhir (*end-state*) dari arah kebijakan jangka panjang Bank Indonesia. Visi besar SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif. Untuk implementasinya, Bank Indonesia akan fokus pada 3 (tiga) aspek yakni keterbukaan data, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, dan pengaturan sistem pembayaran yang integratif.